

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR)
DI KECAMATAN BRANG ENE**

PROPOSAL SKRIPSI



Disusun oleh :

IYUT INDRAJAYA

21413A0053

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSTUJUAN

Judul Skripsi : **Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **IYUT INDRA JAYA**

Nim : **21413A0053**

Telah disetujui :

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Amil, MM
NIDN : 0831126204

Ilham Zitri S.IP M,IP
NIDN :0817119102

Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

Ayatullah Hadi, S.IP
NIDN : 0816057902

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masi diberi nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat kesehatan, terutama bagi penulis sehingga mampu menyusun proposal skripsi yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR) DI KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT”. Dalam penyusunan proposal skripsi ini banyak sekali hambatan dan kendala yang di hadapi namun dengan segala daya dan upaya dengan terus berihthar dan berdoa kepada Allah SWT, dan motivasi dari berbagai pihak proposal ini dapat terselsaikan

Untuk itu peneliti menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayah dan bunda tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan doa
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Dekan Fisipol Dr. H.Muhammad Ali, M.Si
4. Ketua prodi Ilmu Pemerintahan bapak Ayatullah Hadi, S.IP
5. Bapak Drs. Amil ,MM selaku pembimbing utama
6. Bapak Ilham Zitri S.IP MIP
7. Teman-teman yang banyak memberikan motivasi dan masukan dalam proses penyusunan proposal skripsi.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih banyak kelemahan yang perlu disempurnakan. Untuk itu menulis memohon maaf atas semua keterbatasan dan penulis mengharpkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik.

Penulis,

IYUT INDRAJAYA
NIM : 21413A00

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Partisipasi	18
2.2.1 Tahap-tahap Partisipasi	20
2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	20
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Partisipasi	22
2.2.4 Bentuk partisipasi	23
2.2.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat	23
2.3 Gotong Royong	26
2.3.1 Sistem Kerja Gotong Royong Pada Masyarakat.....	27
2.4 Pemberdayaan	28
2.5 Indikator keberdayaan	30
2.6 Komponen pemberdayaan.....	31
2.7 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	32
2.8 Proses Pemberdayaan.....	34
2.9 Kerangkak Berfikir Peneliti.....	38
2.10 Definisi Konseptual.....	40
2.11 Definisi Operasional.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Jenis Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Dokumentasi	51
3.6 Analisa Data	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia (sesuai dengan fitrahnya) merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial antar sesamanya, contohnya dalam melakukan pekerjaan pembuatan gorong-gorong di balai desa, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang sehingga membutuhkan pertolongan orang lain dan menjalin hubungan serta interaksi antar masyarakat agar dapat diselesaikan dengan cepat, tepat waktu, dan pekerjaan pun menjadi ringan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya partisipasi, kerjasama, dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan kegiatan pembangunan.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting. Dengan adanya gotong royong, segala permasalahan dan pekerjaan yang rumit akan cepat terselesaikan jika dilakukan dengan cara kerjasama dan gotong royong diantara sesama penduduk di dalam masyarakat. Misalnya pembuatan gapura di balai desa akan cepat terlaksana apabila masyarakat di dalamnya bergotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Azinar Sayuti (1983:2) sebagai berikut: “Segi lain yang dapat diperoleh faedahnya dari

gotong royong ini adalah rasa keikutsertaan dan tanggungjawab bersama warga masyarakat bersangkutan dalam usaha pembangunan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik atau menurut bidang-bidang kehidupan yang terdapat di lingkungan masyarakat setempat”. Kegiatan gotong royong tentunya perlu didukung oleh adanya partisipasi dan rasa solidaritas dari seluruh masyarakat. Solidaritas yang muncul dalam masyarakat disebabkan adanya beberapa persamaan, seperti persamaan kebutuhan, keturunan, dan tempat tinggal.

Ada yang berbeda sistem gotong royong yang terjadi di kabupaten Sumbawa Barat dimana gotong royong dijadikan landasan utama dalam percepatan pembangunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam pasal 4 menyebutkan bahwa PDPGR terdiri atas tiga bagian yaitu gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Jenis gotong royong memiliki ruang lingkup tersendiri seperti halnya gotong royong mandiri yang jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidensial seperti perbaikan badan jalan di pemukiman baru, pembangunan dan/atau perbaikan drainase, pembangunan dan/atau perbaikan irigasi pertanian skala kecil, perbaikan dan/atau membersihkan sarana publik seperti masjid, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman dan pantai wisata. Sedangkan ruang lingkup gotong royong stimulan meliputi pembuatan jamban keluarga, pembuatan taman, pembuatan

gorong-gorong di lingkungan, pembuatan pintu air irigasi, pembuatan sarana pendukung pariwisata, pembangunan balai pertemuan, rehab rumah tidak layak huni, pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi. Kemudian ruang lingkup gotong royong padat karya meliputi pembangunan jalan baru/jalan usaha tani, pembersihan danau lebo Taliwang, pembangunan/normalisasi saluran irigasi, pembangunan badan jalan, pengkerasan jalan lingkungan, pembangunan rabat beton jalan lingkungan.

Keberhasilan terlaksananya program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) biasa dilihat dari penghargaan yang didapat daerah salah satu penghargaan yang diraih daerah kabupaten Sumbawa Barat adalah Government award 2019 versi majalah *Sindo Weekly* seperti yang di sampaikan pimpinan redaksi majalah *Sindo Weekly*, Nevy Hetharia mengatakan *“penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing”*. Pihaknya sejak 2014 memang selalu konsen mempublikasikan perkembangan kabupaten/kota yang tersebar di tanah air. *“Kami pembangunan indonesia tergantung dari pembangunan di daerah terlebih pembangunan di pedesaan”* kata Nevy dalam sambutannya di malam Apresiasi Government Award 2019, ia menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan sejumlah akedemisi dengan memperhatikan keaslian ide, kelembagaan yang menangani

inovasi, perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.¹

Kabupaten Sumbawa Barat berada pada urutan 8 (delapan) penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menekan angka kemiskinan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbawa Barat. Nominasi ini didasarkan juga atas pertimbangan beberapa program strategis dan cerdas yang di programkan Bupati Sumbawa Barat H. W Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin. KSB dinilai berhasil dalam menjalankan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan (PDPGR) ini. Kabupaten Sumbawa Barat berhasil membangun jambanisasi, rehab rumah tidak layak huni, pemberian bantuan social, dan kesehatan yakni Pariri Disabilitas dan Pariri Lansia dengan pemberian tunjangan kesehatan dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu. Pemberian dana stimulant usaha, mulai dari Bariri Tani, Bariri Ternak dan Bariri UMKM.²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik menelusuri lebih lanjut tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program

¹ <https://nasional.okezone.com/red/2019/05/01/337/2050079/ini-30-daerah-yang-terima-government-award-2019-sindo-weekly> (diakses pada tanggal 01 juni pukul 22.03 wita)

² <http://infopublik.id/kategori/nusantara/346329/pemberdayaan-gotong-royong-antar-ksb-raih-government-award-2019>(diakses pada tanggal 01 juni pukul 22.30 wita)

Daerah Pemberdayaan Gotong (PDPGR) di kecamatan Brang Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?
- b. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Ingin mengetahui faktor penghambat dan factor pendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah khazanah dan wawasan keilmuan dalam pendidikan kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Secara akademis

Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait gejala social Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong-Royong

c. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong-Royong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Martiana Dwi Rahayu fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Lampung (2018) dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Hasil penelitian : bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan. Selain itu factor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Desa Sinarsari banyak di pengaruhi oleh kepemimpinan local yakni Kepala Desa, staf Kepala Kepala Desa yang dinilai

jujur, ramah baik dan berwibawa membuat ia disegani dan mudah diterima oleh masyarakat. Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Namun perbedaannya adalah hanya pada nama program yang diteliti dan lokasi penelitian serta teori partisipasi yang digunakan.

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Deby Pebrianti fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanuddin (2017) dengan judul *Gotong Royong Dalam Membangun Tongkonan di Desa Gandang Batu Kecamatan Gandang Batu Silanan Tana Toraja*. Hasil penelitian, Orang Toraja sangat senang bergotong royong seperti pada pembangunan tongkonan karena di situlah terlihat bagaimana suatu keluarga saling bekerja sama untuk membangun tongkonan dan darinya juga terlihat bagaimana peran panitia untuk membuat keluarga yang jauh dapat berpartisipasi dalam pembangunan Tongkonan To Barak Lombok Malaleo. Dalam pembangunan tongkonan, terdapat bentuk-bentuk gotong royong seperti dibentuknya panitia sehingga ada yang dapat mengontrol pembangunan tersebut. Ada juga penentuan lokasi tongkonan yang bisa terjangkau oleh anggota keluarga yang setelahnya ditentukan cara pencarian dana untuk pembangunan tersebut. Adapun kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang gotong royong dan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Rizal Andreean tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (2014). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa : (1) pada

pelaksanaan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSREMBANGKEL), masih belum optimal pihak kelurahan hanya melibatkan beberapa pihak yang dianggap mewakili masyarakat di Kelurahan Sambutan untuk ikut serta menghadiri dan mendiskusikan usulan-usulan yang telah terkumpul. (2) dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di pelita 6 Kelurahan Sambutan dari bentuk fisik partisipasi masyarakat sudah menunjukan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari bentuk partisipasi tenaganya dari kegiatan gotong royong dan donasi yang disumbangkan untuk pembangunan pos kampling dan sebagainya. (3) Pemanfaatan pembangunan yang dihasilkan pada saat ini sudah cukup memberikan manfaat bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan sekarang tinggal bagaimana masyarakatnya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan pembangunan yang telah dihasilkan dari kepedulian masyarakat di wilayah Kelurahan Sambutan mereka. (4) Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan di Kelurahan Sambutan sudah ada. Ketika masyarakat sudah ikut berpartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (dalam hal menyampaikan usulan) masyarakat sudah mampu menilai suatu kondisi yang ada di lingkungan mereka. (5) Faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dapat dilihat dari segi pendukungnya adanya kesadaran/kemauan dan inisiatif tiap individu dari sebagian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang ada sedangkan dari segi penghambatnya hambatan

yang timbul akibat dari pengaruh luar masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait tentang kegiatan pembangunan ditingkat Rukun Tetangga yang dikordinir oleh Ketua RT sebagai penanggungjawab kurang mendorong peran aktif masyarakat untuk melakukan kegiatan melalui musrembang maupun dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat gotong royong.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rendi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur (2017). Hasil penelitian, Partisipasi bentuk tidak nyata, tahap penumbuhan ide untuk pembangunan lingkungan dalam tahap ini kita harus melihat, apakah pelaksanaan program pembangunan tersebut didasarkan atas gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan dari atas. jika datangnya dari masyarakat itu sendiri karna didorong oleh tuntunan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu maka peran aktif masyarakat akan lebih dan juga sebaliknya. Jika masyarakat diikut libatkan di dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya. Tahap pengambilan keputusan tahap ini adalah bahwa setiap orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberi fikirian-fikirannya dalam membuat suatu keputusan untuk memmbangun diri, keluarga dan daerahnya. Keikutsertaan anggota atau seseorang didalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggungjawab dalam melaksanakan, mengembangkan setiap pembangunan lingkungan yang dilakukan. Dengan demikian akan tumbuh rasa tanggungjawab

secara sadar kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif dengan penuh kesadaran.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Susiana fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2017) dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat*. Hasil penelitan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 sampai 2017. Implementasi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Pengaruh kesejahteraan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Kelanir telah memberikan hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilihat dari peningkatan kualitas hidup baik dibidang ekonomi, kesehatan maupun jaminan sosial dari PDPGR. Selain itu tumbuhnya rasa ketercukupan masyarakat terhadap bantuan yang diterima melalui kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh PDGPR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.
2. Akses dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR telah memberikan pengaruh yang besar dalam keberlangsungan program di Desa Kelanir sejak tahun 2016, baik dilihat dari aspek ketersediaan sumber daya maupun manfaat dan hasil sumber daya telah memenuhi kebutuhan masyarakat desa Kelanir.

3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tidak berjalan maksimal pada setiap kegiatan PDPGR di Desa Kelanir, hal ini dibuktikan dengan rendahnya keaktifan masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan konsep yang dijunjung tinggi oleh PDPGR yaitu nilai gotong royong pada setiap kegiatan program.
4. Untuk mengukur tingkat pengontrolan dalam pelaksanaan program ini dilihat dari pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, namun pengendalian oleh masyarakat tidak berjalan maksimal dan jauh dari yang diharapkan. Sedangkan pengendalian oleh pemerintah diwujudkan melalui pembuatan laporan secara berkala oleh semua agen pemberdayaan PDPGR.
5. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Kelanir menjadi faktor pendukung ketika ditinjau dari aspek implementator dan kelompok sasaran yang sudah relevan dengan dasar hukum dan pedoman yang ditentukan oleh penyelenggara program. Disisi lain, indikator komunikasi menjadi faktor penghambat ketika dilihat dari aspek sosialisasi yang tidak pernah dilaksanakan di Desa Kelanir dan berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat terkait program
6. Sumber Daya menjadi faktor penghambat ketika ditinjau dari kemampuan implementator di Desa Kelanir yang tergolong rendah dan tentunya mempengaruhi keberhasilan program. Namun disisi lain, indikator ini menjadi pendukung ketika ketersediaan dana yang mencukupi dan

mempengaruhi keberhasilan program pada setiap pelaksanaan kegiatan PDPGR di setiap Desa.

7. Disposisi menjadi faktor pendukung dalam implementasi PDPGR ketika aspek tingkat komitmen pelaksana dan tingkat demokratis pelaksana berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan.
8. Indikator struktur birokrasi adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan program ketika dilihat dari aspek struktur birokrasi yang tersusun dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Selain itu indikator ini menjadi penghambat karena Structure Operational Procedure (SOP) yang belum ada sejak tahun 2016.

Implementasi PERDA No.3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Kelanir sudah berjalan sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan serta mengurangi angka kemiskinan meskipun belum mampu mengentaskan kemiskinan dalam skala besar. Namun melalui kegiatan Pembangunan Jamban, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bariri Tani, Bariri UMKM, Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas diikhtiarkan mampu mengatasi masalah tersebut yang menjadi polemik dalam masyarakat secara bertahap. . Adapun kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu tentang PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat dan dalam hal ini peneliti coba melihat PDPGR dari sudut Partisipasi masyarakat dalam sekup kecamatan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Martiana Dwi Rahayu (2017)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Peran aktif masyarakat • Keterbukaan lembaga 	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari kurangnya partisipasi aktif masyarakat di karenakan kurangnya sosialisasi
2	Deby Pebrianti (2017)	Gotong Royong Dalam Membangun Tongkonan di Desa Gandang Batu Kecamatan Gandang Batu Silanan Tana Toraja	<ul style="list-style-type: none"> • Keikut sertaan masyarakat • Gotong royong dalam pembangunan • 	Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Orang Toraja sangat senang bergotong royong seperti pada pembangunan tongkonan karena di situlah terlihat bagaimana suatu

					keluarga saling bekerja sama untuk membangun tongkonan
--	--	--	--	--	--

3	Rizal Andreean (2014)	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Peran aktif masyarakat • Keterbukaan lembaga 	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	pada pelaksanaan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSREMBANGKEL), masih belum optimal pihak kelurahan hanya melibatkan beberapa pihak yang dianggap mewakili masyarakat di Kelurahan Sambutan untuk ikut serta menghadiri dan mendiskusikan usulan-usulan yang telah terkumpul
4	Ahmad Rendi (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong di Desa Batu Timbau	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan masyarakat • Lembaga pemerintah 	Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif	Partisipasi bentuk tidak nyata, tahap penumbuhan ide untuk pembanguna

		Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur			n lingkungan dalam tahap ini kita harus melihat, apakah pelaksanaan program pembangunan tersebut didasarkan atas gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan dari atas.jika datangnya dari masyarakat itu sendiri karna didorong oleh tuntunan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu maka peran aktif masyarakat akan lebih dan juga sebaliknya
5	Susiana(2017)	Impementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengentasan Kemiskinan di	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan • Lembaga 	Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif	Pengaruh kesejahteraan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR terhadap

		Desa Kelaner Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat			pengentasan kemiskinan di Desa Kelanir telah memberikan hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilihat dari peningkatan kualitas hidup baik dibidang ekonomi, kesehatan maupun jaminan sosial dari PDPGR. Selain itu tumbuhnya rasa ketercukupan masyarakat terhadap bantuan yang diterima melalui kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh PDGPR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.
--	--	--	--	--	--

2.2 Partisipasi

Keith Davis (dalam Sastropetro 1988 :16) mengemukakan definisi partisipasi sebagai berikut, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral, atau perasaan di dalam situasi yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak semata-mata berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap masyarakat.

Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:52) menyatakan bahwa, seseorang yang berpartisipasi mengalami keterlibatan secara langsung (dirinya/egonya) yang sifatnya aktif dalam pekerjaan untuk kepentingan bersama. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan dalam pikiran dan perasaannya untuk melaksanakan perencanaan suatu kegiatan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka ada tiga unsur penting dalam partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan masyarakat. Ini berarti terdapat rasa senang dan kesukarelaan untuk melakukan kegiatan gotong royong.

3. Dalam partisipasi harus ada tanggungjawab. Unsur tanggungjawab ini merupakan segi yang menonjol dari kehidupan masyarakat dalam gotong royong.

Menurut Davis (dalam Sastropetro, 1988 :57), persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, yaitu yang bersangkutan memiliki pemikiran untuk meningkatkan kegiatan gotong royong.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak ada pemaksaan atau penekanan.

Dengan demikian berarti, konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu wujud dari peranserta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2.2.1 Tahap-tahap partisipasi

Menurut Thubany (dalam purnamasari 2006:23) partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam meemutuskan persoalan mereka sendiri sehari-hari dan representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas dasar kepentingan bersama. Oleh karnanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada (1) pembuatan keputusan (2) penerapan keputusan (3) menikmati hasil (4) evaluasi hasil. Sementara 4 aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni :

- a. Informasi atau akses lainnya,
- b. Inisiatif (voice/suara) dan apresiasi warga (masukan),
- c. Mekanisme pengambilan keputusan,
- d. Control pengawasan.

Dilihat dari perkembangannya partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontrinbusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela, tetapi lebih di tekankan kepada pengembangan kapasitas masyarakat yang didalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan serta control dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Menurut Slamet (1993 :97), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

1. Jenis kelamin, partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda, hal ini disebabkan adanya system pelapisan social yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan derajat dan kedudukan hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.
2. Usia, perbedaan usia akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Didalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda yang berbeda –beda dalam hal-hal tertentu, seperti menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.
3. Tingkat pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.
4. Tingkat penghasilan, penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar secara tunai dan jarang melakukan kerja fisik secara sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

5. Mata pencarian, hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan lain-lain.

Menurut Irene (2015 : 50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab pada kelompoknya.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam hal pencapaian keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat sangat penting didalam seluruh proses pembangunan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir.

2.2.3 Fungsi dan manfaat partisipasi

Menurut carter (dalam santoso, 2005:2) menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
2. Meningkatkan proses belajar
3. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

4. Menciptakan kesadaran politik
5. Keputusan dari partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
6. Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen system demokrasi

2.2.4 Bentuk partisipasi

Partisipasi dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Siti Irene A.D, 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

2.2.5 Tingkat partisipasi masyarakat

Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) membagi partisipasi masyarakat dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam perencanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

4. Partisipasi dalam tahap evaluasi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan merupakan proses dan wujud keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan untuk meningkatkan kebersamaan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dipastikan akan mempengaruhi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan, semakin besar sifat membangun dan tanggungjawab masyarakat dalam meningkatkan kebersamaan untuk mewujudkan gotong royong. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat masih rendah maka hal ini dapat menyebabkan partisipasi masyarakat akan menurun sehingga melahirkan kebijakan yang bersifat merusak dan kurang bertanggungjawab dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi dalam perencanaan Partisipasi dalam perencanaan akan dapat berjalan dengan efektif apabila masyarakat dan Kepala Desa saling bekerjasama untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan suatu kegiatan sangat ditekankan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU No 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas) yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Perencanaan suatu kegiatan atau pembangunan dalam pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang untuk membuat perencanaan suatu kegiatan.

Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi ini merupakan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan atau pembangunan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyumbangkan tenaga, harta, pikiran, dan lain-lain. Contoh partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Partisipasi dalam memanfaatkan hasil Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Masyarakat di daerah harus dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan pembagian sesuai dengan pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya partisipasi untuk menikmati hasil dari sebuah kebijakan Kepala Desa dapat menimbulkan sikap tidak puas bagi masyarakat.

Partisipasi dalam evaluasi Setiap kebijakan dinyatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat setidaknya diberi kesempatan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan merupakan sikap dukungan yang positif terhadap kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan dan pelaksanaannya. Masyarakat harus bersikap kritis apakah kebijakan tersebut sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum (apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan). Tanpa adanya

evaluasi dari masyarakat justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat.

2.3 Gotong Royong

Abdillah (2006 :6) mengemukakan “Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan”.

Prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi dalam mencapai kesejahteraan bersama secara adil (adil dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi, prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan terlihat dari pasal 33 UUD 1945).

1. Perekonomian disusun secara bersama berdasarkan atas asas hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan hanya segelitik atau individu. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha yang dikerjakan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga berdasarkan batas kemampuannya masing-masing, kerjasama saling membantu atau bergotong royong dalam masyarakat demi kepentingan bersama suda terlaksana sejak jaman dahulu kala karna dengan bergotong royong kegiatan menjadi lancar dan mencapai tujuan.

2.3.1 Sistem kerja gotong royong dalam masyarakat

Gotong royong adalah kegiatan/sistem kerja yang dilakukan secara bersama-sama dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa, sehingga setiap warga yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan berkewajiban untuk membantu, dengan kata lain di dalamnya terdapat hubungan azas timbal balik antar warga masyarakat.

Masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam sistem kerja, namun dalam kesatuan masyarakat lokal pada umumnya menerapkan sistem kerja gotong royong yang diiringi dengan rasa solidaritas. Dengan demikian antar warga masyarakat lebih terjalin rasa kekerabatannya. Gotong royong sebenarnya merupakan penggambaran adanya perilaku masyarakat di wilayah pedesaan yang bekerja untuk pihak lain. Pada umumnya tindakan ini dilakukan tanpa mengharapkan adanya upah. Gotong royong juga merupakan suatu sistem kerja yang sudah mengakar dan telah meliputi aspek-aspek dominan lain dalam berbagai kehidupan sosial.

Dalam pandangan Kropotkin (2006 : 18) tentang gotong royong pada masyarakat modern mengungkap bahwa : kecenderungan gotong royong dalam diri manusia memiliki asal usul di masa lalu yang sangat jauh. Kecenderungan ini pun terjadi sangat erat dengan semua evolusi umat manusia di masa lalu. Karenanya, kecenderungan ini tetap di pertahankan oleh manusia hingga kini, diluar semua yang terjadi didalam sejarah, kecenderungan ini terutama berkembang selama kurun kedamaian dan kemakmuran.

Pernyataan Kropotkin tentang gotong royong adalah sebuah keyakinan dirinya miski terjadi perubahan dalam arena kehidupan manusia, gotong royong tetap ada. Ia menunjukan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari Adanya interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu didalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan.

2.4 Pemberdayaan

Menurut Suharto (2010 :59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk memperkuat suatu keberdayaan kelompok lemah dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam lingkup masyarakat sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu perubahan masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan fisik,

ekonomi, maupun social seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan social.

Menurut Suhendra (2006 :74-75) pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif sehingga akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan hak dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015 mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut mubyarto (2000 :263) pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan selain sebagai pengontrolan akan mempercepat proses pembangunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan motivasi dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

2.5 Indikator Keberdayaan

Menurut Widjajanti (2011 :18) keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat mentukan alternative pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam mengambil keputusan (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Menurut Suhendra (2006 :86) terdapat indicator keberdayaan masyarakat yang berdaya, antara lain: (1) mempunyai kemampuan dan menyiapkan pranata dan sumber-sumber yang ada dimasyarakat (2) dapat berjalan bottom up planning (3) kemampuan dan aktifitas ekonomi, (4) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, (5) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Oleh karna itu, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Menurut Kindervatter (1979) dalam Mu'arifuddin (2011 :27-27) pelaksanaan pemberdayaan memiliki sebelas dimensi, yaitu; (1) structure, penekanan pada struktur pembentukan yang dilatar belakangi adanya kesamaan tujuan, (2) setting time, penggunaan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan, (3) rule of learner, tugas warga belajar dan fasilitator bekerja sama dalam menentukan dan membuat keputusan secara bersama, (5) relationship between learner and fasilitator, hubungan diantara belajar dan fasilitator, (6) need assessment, asesmen kebutuhan diidentifikasi dari warga belajar serta fasilitator, (7) curriculum development, tujuan yang ingin dikembangkan, (8) subject matter, menunjukan pada isi

pemberdayaan, fasilitator membantu warga belajar dalam menyelesaikan masalahnya, (9) material, bahan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan, (10) methods, metode yang digunakan, (11) evaluaton, tindakan evaluasi sebagai wujud keberhasilan pemberdayaan.

Dalam pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah yang menjadi penggerak pemberdayaan harus memiliki indikator-indikator masyarakat yang berdaya, untuk mengukur potensi dan sejauh mana pengetahuan dan kemampuan masyarakatnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan masyarakat kemudian mengklasifikasikan untuk diberikan bimbingan dan pelatihan kepada individu atau kelompok (masyarakat) yang berada dibawah indikator-indikator keberdayaan. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan maksimal.

2.6 Komponen pemberdayaan

Menurut Nugroho (2014 1-4) komponen pokok yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni (1) penelitian untuk penggalian data dan informasi yang dijadikan pedoman dalam menentukan rencana strategis (strategic plan) sesuai kebutuhan (needs). (2) penelitian dengan fokus pengembangan kapasitas (capacity building) terhadap target pemberdayaan, (3) kerja sama dan inovasi: pelatihan akan berjalan efektif apabila dilengkapi jalinan kerjasama dengsn pihak lain yang memiliki kepakaran dan komitmen, serta mengundang inovasi spesifik lokasi. Sinkronisasi dari komponen tersebut diwujudkan dari hasil penelitian, (4) pemangku kepentingan dan tenaga pendamping seyogyanya

gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur LSM yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi pemberdayaan. Disamping itu, tenaga pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan, (5) serta pengawasan dan evaluasi merupakan masukan untuk memodifikasi dan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Semua elemen tersebut diimplementasikan dalam konsepsi “partisipatif”.

2.7 Strategi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya upaya pemberian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat terutama kaum marginal. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra (2006 :87) antara lain: (1) kemampuan politik yang mendukung, (2) suasana kondusif yang mengembangkan potensi secara menyeluru, (3) motivasi, (4) potensi masyarakat, (5) peluang yang tersedia, (6) kerelaan mengalihkan wewenang, (7) perlindungan, (8) kesadaran.

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan cara, metode yang dipermudah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suharto (2010 :66) strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga arus atau matra: (1) arus mikro, pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas kehidupannya.

Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang terpusat pada tugas, arus mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi, (3) arus makro, pendekatan ini juga disebut sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat. Strategi sistem besar memandang memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memiliki serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut Dobais dan Miley (1992) dalam Suharto (2010 :68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Membangun relasi pertolongan ,
 - a. Merefleksikan respon empati
 - b. Menghargai pilihan dan hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri
 - c. Menghargai perbedaan dan keunikan individu
 - d. Menekankan kerjasama klien.
2. Membangun komunikasi yang ;
 - a. Menghormati martabat dan harga diri klien

- b. Mempertimbangkan keragaman individu
 - c. Berfokus pada klien
 - d. Menjaga kerahasiaan klien
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang :
- a. Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah
 - b. Menghargai hak-hak klien
 - c. Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar
 - d. Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social melalui :
- a. Ketaatan terhadap kode etik profesi
 - b. Keterlibatan dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan
 - c. Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi dalam isu-isu public
 - d. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan keterbukaan (pemerintah) dimana individu diberikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat diperlukan bimbingan dan pelatihan dari pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM agar mampu menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungannya. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari

merumuskan kebijakan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi akan memberikan kepercayaan diri kepada setiap individu karna merasa dihargai keberadaannya. Dengan begitu, Setiap individu akan memiliki rasa tanggungjawab dalam mensukseskan program. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri dalam memperbaiki kondisi ekonominya. Dengan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat, maka akan menimbulkan masyarakat yang partisipatif.

2.8 Proses pemberdayaan

menurut widjajanti (2011 :18) proses pemberdayaan merupakan proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal dan non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui : (a) kualitas dan kuantitas ketelibatan masyarakat melalui dari kegiatan kajian atau analisis masalah, (b) perencanaan program, pelaksanaan program, (c) pelaksanaan program (d) keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

Soetomo (2013 :95-124) mengemukakan apabila pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya. Langkah langkah pemberdayaan sebagai berikut :

1. reorientasi merupakan peninjauan ulang terhadap pemberian kewenangan kepada stakeholder, reorientasi perlu dilakukan karena perspektif memiliki orientasi dan pandangan yang berbeda tentang kapasitas masyarakat dan tentang posisi masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai pihak terutama Negara dan pasar.
2. Gerakan masyarakat dapat menciptakan iklim social dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mendorong pengambilan kebijakan untuk memperlihatkan nilai pemberdayaan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan masyarakat.
3. Institusi local sebagai pemberdayaan dan penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan, pendewasaan dan penyempurnaan tersebut melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
4. Pengembangan kapasitas merupakan unsur utama dari proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan.

Sulistiyani (2004 :118) mengemukakan proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya (pemerintah) berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih kepada kemampuan efektifnya untuk menciptakan

kesadaran konatif yang diharapkan. Seutuhnya penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2. Tahap transformasi berupa kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Masyarakat akan hanya dapat memberi peran partisipasinya pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja. Belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melahirkan inovasi-inovasi dilingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat sendiri akan melakukan pembangunan. Konsep pembangunan masyarakat

menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

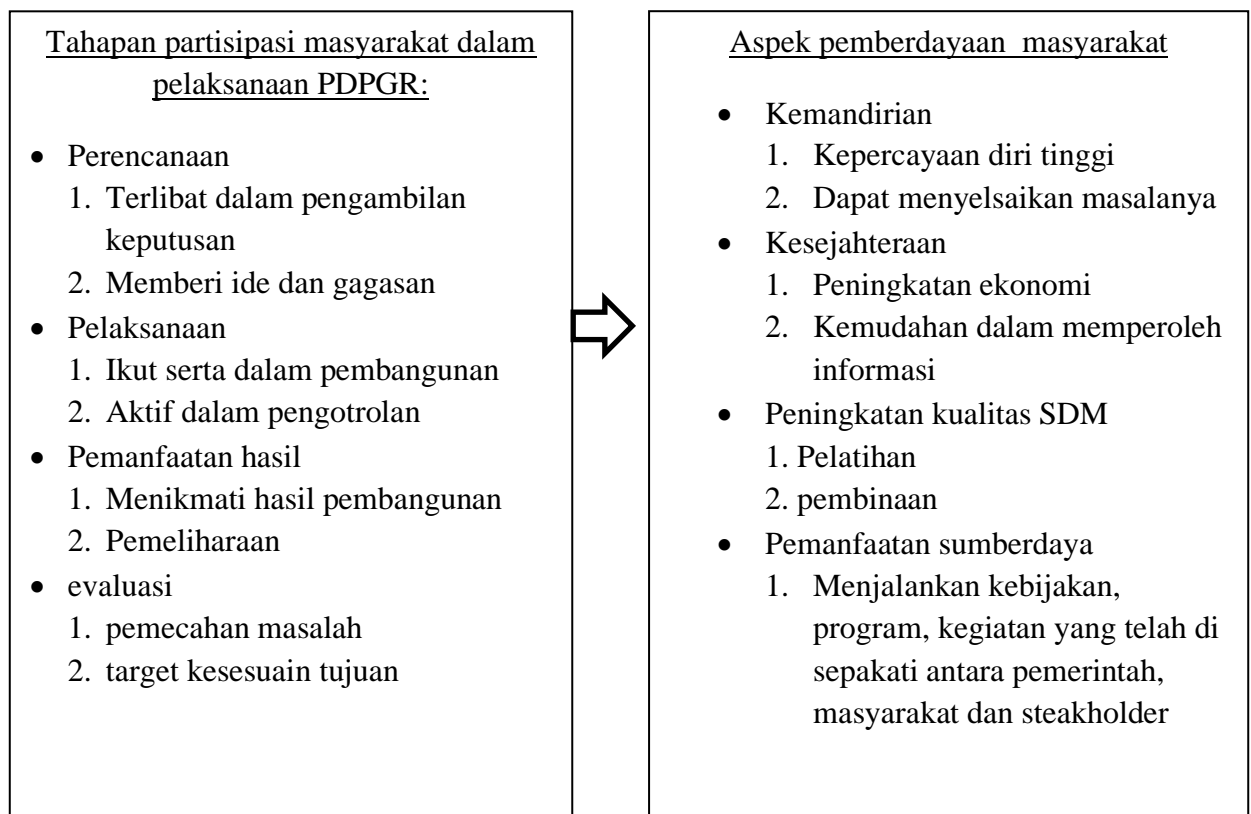
2.9 Kerangka berpikir peneliti

Untuk mencapai partisipasi masyarakat yang ideal menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) kedua ahli ini membagi partisipasi menjadi empat bagian yaitu Partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, Partisipasi dalam tahap evaluasi. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan merupakan proses dan wujud keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan untuk meningkatkan kebersamaan dan taraf hidup. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dipastikan akan mempengaruhi kebijakan, perencanaan, melaksanakan, dan tahap evaluasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan, semakin besar sifat membangun dan tanggungjawab masyarakat dalam meningkatkan kebersamaan untuk mewujudkan gotong royong. Sebaliknya apabila kesadaran masyarakat masih rendah maka hal ini dapat menyebabkan partisipasi masyarakat akan menurun sehingga melahirkan kebijakan yang bersifat merusak dan kurang bertanggungjawab dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Selain teori tahapan partisipasi di samping itu juga, terdapat pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015 mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori tahapan partisipasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Ketika kedua teori tersebut sudah memenuhi indikator dan aspek yang ada didalamnya, maka tentu akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari indikator tersebut. Dimana faktor yang mempengaruhi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat. Kedua faktor ini akan sangat mempengaruhi dari keberhasilan suatu program . Jika dikaitkan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong maka indikator dan aspek yang ada di teori partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi dari keberhasilan program.

Gambar 2.9 Kerangka Berpikir Peneliti



2.10 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan

memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

- a. Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) mengajukan tahapan partisipasi didalamnya terdapat 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu program, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dalam evaluasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri tapi saling terkait satu sama lain serta saling mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya

- b. Pemberdayaan masyarakat

pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015 mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

2.11 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu :

a. Aspek-aspek tahapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
PDPGR

1. Partisipasi dalam perencanaan
 - a. Terlibat dalam pengambilan keputusan
 - b. Memberi ide dan gagasan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - a. Ikut serta dalam pembangunan
 - b. Aktif dalam pengontrolan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
 - a. Menikmati hasil pembangunan
 - b. Pemeliharaan
4. Partisipasi dalam evaluasi
 - a. Pemecahan masalah
 - b. Target/kesesuaian tujuan

Tabel 2.9
Defenisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Partisipasi dalam perencanaan	a. terlibat dalam pengambilan keputusan
		b. Memberi ide dan gagasan
2	Partisipasi dalam pelaksanaan	a. ikut serta dalam pembangunan
		b. Aktif dalam pengontrolan
3	Partisipasi dalam pemanfaatan	a. Menikmati hasil pembangunan
		b. Pemeliharaan
4	Partisipasi dalam evaluasi	a. Pemecahan masalah
		b. Target/kesesuain tujuan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian diskriptif kualitatif. penelitian yang ditunjukan dalam pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, satu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dengan tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan factual serta akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena-fenomena yang di selidiki” (Narbuko & Achmadi, 2008 : 44).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian diskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena-fenomena yang terjadi secara sistematis. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah dapat menguraikan dan membatasi latar belakang penelitian. Artinya apa yang di bahas dalam penelitian ini tidak terlepas dari latar belakang dan pokok permasalahan yang sudah ditetapkan, sehingga peneliti lebih terfokus terhadap apa yang diteliti. Selain itu tidak terikat dengan asumsi sebelumnya, melainkan asumsi yang berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan. Artinya bahwa dalam penelitian ini, peneliti mengikuti perkembangan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di samping itu

juga menjadikan peneliti memiliki hubungan yang eksplisit dengan responden sehingga dalam pengumpulan data dan informasi dalam penelitian, peneliti tidak mengalami kesulitan kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di kecamatan Brang ene.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada tahun 2020

3.3 Jenis Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Maka jenis data sangat dibutuhkan. Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini yaitu :

3.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat penelitian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari (Sugiono 2018 :225). Lebih jauh di jelaskan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki dimana datanya dapat diperoleh melalui case study, survey

atau pencacahan (Margono, 2004 : 23) jadi dapat di pahami bahwa data primer merupan data yang diperoleh langsung dari informasi atau individu baik dengan survey maupun wawancara.

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu sebuah metode berdasarkan kreteria atau tujuan yang dikehendaki oleh peneliti, jadi responden dalam penelitian ini adalah pak camat selaku kepala pemerintah kecamatan Brang Ene, Kepala Desa, RT/RW, Tim PDPGR selaku pengontrol sekaligus pelaksanan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dan masyarakat selaku partisipan.

Tabel
Responden dalam Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat Brang Ene	1 orang
2	Kepala Desa	5 orang
3	Ketua RT/RW	15 orang
4	Tim PDPGR	5 orang
5	Masyarakat umum	25 orang

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data dari pihak lain atau data yang tidak secara langsung di peroleh dari subyek penelitian (Saifuddin Azwar, 2007,: 91). Lebih jauh dijelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari

pustaka-pustaka (terbitan buku-buku) yang telah ada baik yang resmi ataupun tidak resmi (Margono, 2004 : 34). Jadi dapat dipahami bahwa data skunder merupakan data yang diperoleh dari pustaka atau literature (buku-buku) yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data dalam pengumpulan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya dalam penelitian ini diperoleh dari data primer seperti yang akan peneliti lakukan dengan kepala Pemerintah (camat) kecamatan Brang ene, kepala Desa, tim PDPGR dan masyarakat selaku partisipan. Jadi sumber data disini adalah pelaku/subjek atau orang yang akan memberikan data dan informasi tentang apa yang akan diteliti.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature atau referensi, catatan-catatan penting lainnya atau buku-buku yang berkaitan (relevan) dengan apa yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberfayaan Gotong Royong (PDPGR) DI Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan suatu hal terpenting dalam suatu penelitian. Begitu pula dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang relevan/sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Menurut Nasution 1988 dalam (Sugiono 2018 :226) observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Sugiono 2018 :145) membedakan observasi menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation (observasi non partisipan)

Jadi dapat dipahami bahwa observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis dalam arti observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti, dan hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Adapun observasi pengamat sebagai partisipan artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti dalam penelitian lapangan. Sedangkan partisipasi pengamat sebagai non partisipan. Artinya peneliti tidak mempengaruhi obyek lapangan sehingga kehadiriannya tidak mengganggu situasi dalam keadaan sewajarnya.

Dalam pelaksanaannya lapangan peneliti menggunakan observasi partisipasi pengamat sebagai partisipan, dimana peneliti memiliki peran yang sangat penting yaitu berperan aktif dalam penelitian lapangan dan menjadi bagian integral dari situasi yang dipelajari. Dan adapun alasan peneliti menggunakan observasi ini adalah agar dapat mengenal situasi dengan baik dan dapat mengumpulkan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya dengan tidak mempengaruhi situasi yang sewajarnya.

Sebagai bentuk aplikasi/implementasi observasi tersebut diatas, maka peneliti menyusun pedoman khusus observasi yang dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian kaitannya dengan apa yang diteliti. Pedoman

khusus observasi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan baik itu tempat observasi, orang yang di observasi, data dan informasi hasil observasi yang dilakukan

Adapun metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

3.4.2 Wawancara (Interview)

menurut Arikunto (2002 : 132) mengatakan bahwa metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Menurut (Sugiono 2018 :138-140) wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.

1. Wawancara terstruktur. Artinya wawancara dilakukan berdasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan dirumuskan sebelumnya secara cermat, tepat dan biasanya dalam bentuk tertulis.
2. Wawancara tak terstruktur. Artinya wawancara dilakukan dengan tidak ada persiapan sebelumnya

Sedangkan ditinjau dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Interview bebas. Artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti,
2. Interview terpimpin. Artinya wawancara membawa daftar pertanyaan interview lengkap dan terperinci,
3. Interview bebas dan terpimpin.

Dari berbagai macam interview diatas, peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Dalam aplikasinya peneliti akan menyusun pedoman khusus wawancara terlebih dahulu sebelum turun lapangan kaitannya dengan apa yang peneliti teliti.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti melakukan wawancara dengan camat selaku kepala pemerintahan tingkat kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT/RW dan masyarakat selaku partisipan.

Adapun data dan informasi yang ingin diperoleh dari wawancara ini yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Faktor penghabat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

3.5 Teknik Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah barang-barang tertulis atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dan lain sebagainya (Arikunto, 2002 : 135)

Dari beberapa urain di atas peneliti dapat dipahami bahwa metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, sebab data-data tersebut sangat penting dalam menunjang dalam melakukan analisis.

Adapun dalam aplikasinya peneliti juga akan menyusun pedoman khusus dokumentasi sebelum turun lapangan. Hal ini peneliti lakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dilapangan. Secara khusus teknik informasi ini di gunakan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan sarana dan prasarana PDPGR, jumlah tim PDPGR, struktur organisasi dan data-data lain yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Adapun yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, katagori, dan satuan urain dasar. Dengan kata lain memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, mencari hubungan antara dimensi-dimensi urain (Moleong 2004 : 103).

Dalam aplikasinya analisis data ini peneliti lakukan dengan dengan menggunakan analisis data indukatif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai

dengan hal-hal yang bersifat khusus kemudian pada hal-hal yang bersifat umum atau mengambil kesimpulan secara umum. Selain itu guna untuk memperoleh data yang valid dan meyakinkan, maka peneliti harus melakukan pengorganisasian data, pengelompokan data, dan mengurutkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen lainnya, bahkan komentar peneliti dilapanganpun juga tidak dilupakan. Sehingga peneliti kualitatif dikenal dengan adanya analisis data dilapangan baik itu data lama (data awal), baru, sedang, maupun yang terakhir, semuanya dianalisis secara intensif berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam rumusan dan aturan data atau informasi, penulis mengacu pada pengungkapan, pembuktian dan pemaparan data yang sesuai dengan realita dan tidak menggunakan rumusan data statistik. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut peneliti analisis dengan menggunakan analisis induktif, artinya suatu teknik analisis data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian pada hal-hal yang bersifat umum (Moleong, 2004 : 101).

Jadi dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti harus mencatat, mengorganisasikan dan mengelompokkan serta mengklarifikasikan data yang diperoleh secara teliti dan terinci sesuai dengan masalahnya. Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis induktif,

artinya suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian pada hal-hal bersifat umum.

Untuk memperoleh data yang valid, akurat dan meyakinkan, maka peneliti melakukan pengorganisasian data, mengelompokan data, dan mengurutkan data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen lainnya. Adapun langkah-langkah analisis data peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

2. Data Display

Mendisplay data adalah menyajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan hubungan antar katagori dan sejenisnya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dangan setumpuk data.

3. Conclusion drawing

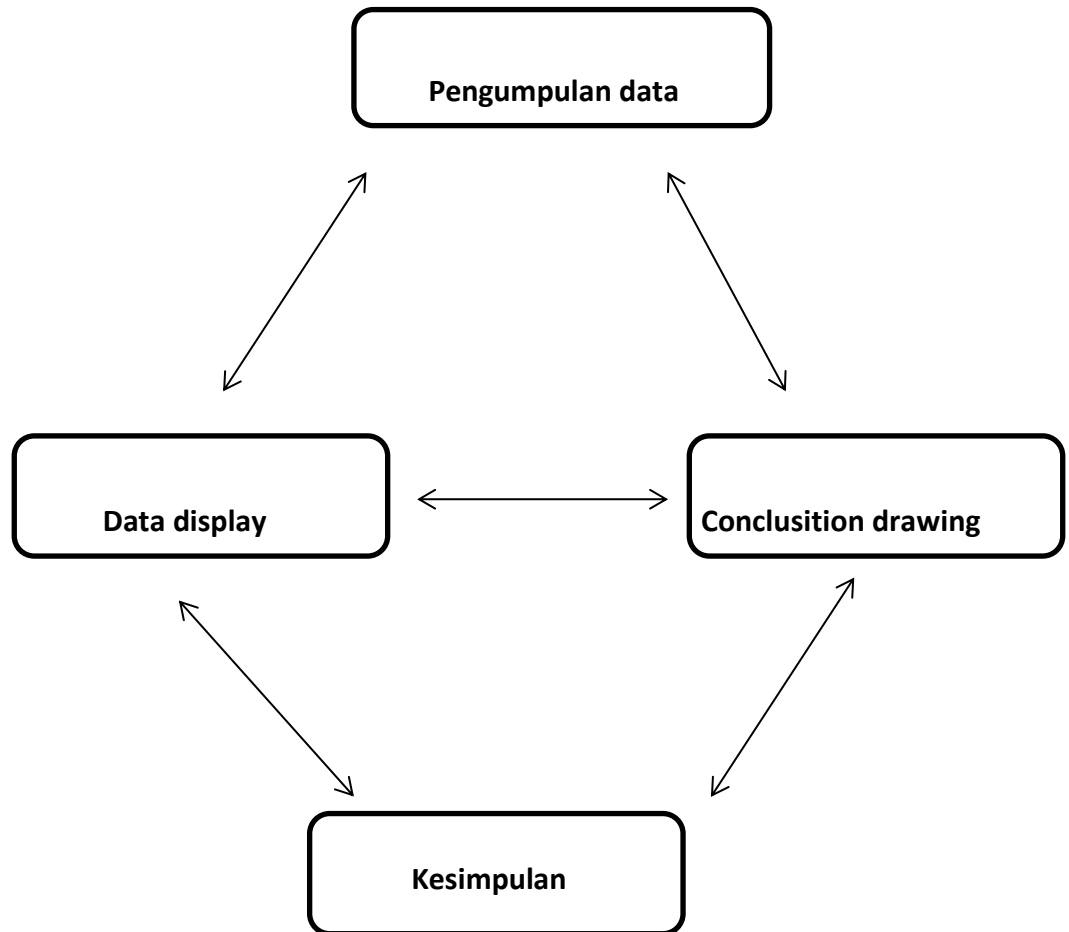
Setelah mendapatkan data yang telah direduksi dan didisplay maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap-tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam analisis data juga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengecek nama dan kelengkapan serta benda yang merupakan sumber data yang telah terkumpul.
2. Mengecek kelengkapan data dan informasi. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali data-data dan informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian termasuk memeriksa tanggal pengutipan data, nama atau sumber data dan lain sebagainya.
3. Selanjutnya peneliti memilih data untuk dimasukan kedalam katagori atau ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Memilah dan memilih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan urutan dan aturan yang telah di tetapkan.

3.6 Bagan analisis induktif



(Sumber : Moleong, 2004 : 101).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Baiqumi, ,2011, *Gotong royong Cermin Budaya Bangsa dalam Arus Globalisasi*. <http://research.amikom.ac.id/index.php/STI/article/view/5097>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Perosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azinar Sayuti, 1983, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan daerah Sumatra*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2005. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- E Jurnal, sos.fisip-unmul.ac.id, *Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur*
- Kropotkin, Peter, 2006, *Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial ; Tumbuhnya Darwinisme Sosial*. Piramedia, Depok.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Mu'arifuddin, 2011, *Pemberdayaan Petani Anggrek Melalui Usaha Agrobisnis Pedesaan Di Kelompok Tani Anggrek Jrobang Indah Orchid Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang*, Skripsi
- Nugroho, Prayogo, 2014, *Komponen Pemberdayaan*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015
- Sastropoetro, Santosa R. A, 1998, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni
- Selamet M. 1985, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, CV. Rajawali
- Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Siregar. 1. 2001, *tesis penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan*, Universitas Indonesia. Depok.
- Suharto, Edi. 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.

- Slamet. 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Maret University Press.
- Santoso, 2005, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam*
- Suhendra, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015
- Widjajanti, Kesi, 2011, *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 12 (1), hlm 15-27